Journal of Business and Information Systems, Vol. 2, No. 1
www.thejbis.org
DOI: 10.36067/jbis.v1i2.34
ISSN: 2685-2543

Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: Studi pada pemerintah desa di Kabupaten Bantul

Yenita Wulandari
Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia
Yenitawd@gmail.com

Sri Widodo
Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia
sriwidodo0102@gmail.com

Abstract: *the objectives of this research is to know the influence of internal control, asymmetry information, observance of accounting rules, and unethical behavior on fraud tendency. The sample of this research is 59 employees on the village governance in the Bantul Regency. This research used purposive sampling as a method to determine the sample. The data of this research is an analysis by validity and reliability testing. The hypothesis was tested by multiple regression analysis. The result of the study shows that internal control and unethical behavior has a significant effect on fraud tendency. In contrast, asymmetry information and observance of accounting rules have no significant influence on fraud tendency.*

Keywords: *internal control; asymmetry information; observance of accounting rules; unethical behavior; fraud tendency*

1. Pendahuluan

Akuntansi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sistem informasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan yang akan diperlukan oleh stakeholders. Laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kinerja pemerintah terhadap masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Dalam hal pelaporan keuangan, instansi pemerintah harus menggambarkan keadaan organisasi yang sebenarnya (Najahningrum, 2013). Pesatnya perkembangan akuntansi membawa dua dampak bagi masyarakat, dampak yang pertama yaitu memberikan manfaat terkait informasi keuangan dan dampak yang kedua yaitu menjadikan sumber kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan seperti adanya korupsi, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan aset (Muna dan Haris, 2018).

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa SPI (Sistem Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengendalian suatu instansi yang dilakukan secara terus-menerus. Kegiatan pengendalian dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggota organisasi dengan maksud untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu SPI dapat memberikan keyakinan yang memadahi atas keandalan laporan keuangan dan aset negara yang aman.

Asimetri informasi adalah kondisi dimana bawahan memiliki akses informasi yang lebih lengkap dibandingkan atasan. Asimetri informasi yang terjadi akan membuka peluang seseorang untuk memberikan informasi yang tidak semestinya diberikan, terutama apabila sebuah informasi yang diberikan berkaitan dengan pengukuran kinerja agen. Asimetri informasi dapat menimbulkan kecurangan dalam pemerintahan. Asimetri informasi dalam

pemerintahan biasanya terjadi diawal proses penyusunan anggaran (Lestari dan Supadmi, 2017).

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2018 yang membahas mengenai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) menjelaskan bahwa SAP adalah semua proses yang harus ditaati oleh semua lembaga pemerintahan dalam proses penyusunan hingga proses pelaporan keuangan. Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai ketaatan terhadap suatu prosedur pengelolaan aset sebuah organisasi, prosedur akuntansi hingga penyajian laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti pendukung sesuai aturan yang ditetapkan oleh SAP. Perilaku tidak etis adalah kondisi yang terjadi jika perilaku seseorang menyimpang dengan kepentingan organisasi atau mementingkan kepentingan sendiri. Perilaku tidak etis terjadi karena adanya suatu pengawasan yang kurang yang dapat membuka kesempatan seseorang untuk bertindak curang dan melakukan tindakan yang tidak etis (Shintadevi, 2015).

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh *Transparency International*, Indonesia menempati posisi ke 89 dari 180 negara yang melakukan tindakan kecurangan dengan nilai yang didapat yaitu 38 dengan skala 0-100, semakin rendahnya nilai yang didapatkan maka semakin korup suatu negara. Tabel 1 menunjukkan berbagai sektor yang didalamnya terdapat kasus korupsi di Indonesia.

Pada tahun 2018 sektor yang paling rawan dilakukan korupsi yaitu anggaran desa, terdapat 96 kasus korupsi terkait dengan anggaran desa. Pemerintah yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah berada dalam wilayah perdesaan. Ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan bisa menjadi paradigma baru bagi pertumbuhan pembangunan, kesejahteraan ekonomi, dan kemakmuran masyarakat perdesaan karena kemakmuran ekonomi tidak selamanya terjadi dalam perkotaan (Atmadja *et Al.*, 2017).

Penyelewengan dana desa merupakan masalah yang akhir-akhir ini banyak menjadi sorotan masyarakat. Kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh oknum pemerintah desa terjadi karena kurangnya transparansi pada pengelolaan dana desa dimana informasi tidak disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oleh karena itu diperlukan berbagai tindakan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa (Muna dan Harris 2018).

APBN yang dialokasikan untuk dana desa cukup besar, sehingga harus dijadikan perhatian oleh semua pihak. Dana desa harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa agar tercapai tujuan dan pemerataan ekonomi masyarakat (Lestari dan Supadmi, 2017). Besarnya dana desa yang dialokasikan ke masing-masing desa harus ada pengawasan yang berjenjang dengan melibatkan masyarakat, aparat pengawas daerah hingga KPK. Pengawasan dana desa dapat dilakukan secara pengawasan vertikal dan pengawasan horizontal. Pengawasan vertikal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang secara langsung mulai dari perangkat desa hingga pemerintah pusat, sedangkan pengawasan secara horizontal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tabel 1. Pemetaan korupsi di Indonesia sepanjang 2018 berdasarkan sektor

No	Sektor	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	Nilai Suap	Pungutan Liar	Pencucian Uang
1	Anggaran Desa	96	Rp 37,2 M			
2	Pemerintahan	57	Rp 287 M	Rp 73,5 M		Rp 57 M
3	Pendidikan	53	Rp 64,7 M	Rp 2,6 M	Rp 1,4 M	
4	Transportasi	32	Rp 470,7 M	Rp 19,2 M	Rp 24,8 M	
5	Kesehatan	21	Rp 56,3 M	Rp 2 M	Rp 4,9 M	
6	Pengairan	21	Rp 203,7 M			
7	Pertanahan	20	Rp 40,2 M	Rp 32,4 M	Rp 372 M	
8	Sosial Kemasyarakatan	18	Rp 46,7 M		Rp 13,7 M	
9	Perbankan	16	Rp 2,1 T			
10	Perizinan	14	Rp 1,1 T	Rp 2,8 T	Rp 107 jt	Rp 34 M
11	Perdagangan	11	Rp 13 M		Rp 591 Rb	
12	Ketenagakerjaan	9	Rp 462,8 M	Rp 6,6 M	Rp 3 M	
13	Pertanian	9	Rp 7,3 M		Rp 1,1 M	
14	Pajak	9	Rp 2,8 M	Rp 106 jt	Rp 13 jt	
15	Pemilu	8	Rp 7,9 M	Rp 635 jt		
16	Energi dan Listrik	6	Rp 571 M	Rp 500 jt		
17	Kependudukan	6	Rp 3,4 M		Rp 93 jt	
18	Koperasi	6	Rp 7,6 M	Rp 30 jt		
19	Peternakan	6	Rp 20,1 M			
20	Peradilan	5		Rp 5,7 M		
21	Perumahan	5	Rp 16,6 M	Rp 500 jt	Rp 110 jt	
22	Telekomunikasi dan Informasi	4	Rp 3,4 M	Rp 12 M	Rp 429 jt	
23	Pertamanan	4	Rp 2,9 M			
24	Keagamaan	3	Rp 2,6 M	Rp 100 jt		
25	Kehutanan	3	Rp 1,4 M	Rp 500 jt		
26	Olahraga	3	Rp 342 jt	Rp 7 M		
27	Pariwisata	3	Rp 861 jt			
28	Kebersihan	2	Rp 1,4 M			
29	Pemadam Kebakaran	2	Rp 390 jt	Rp 3 jt		
30	Kepolisian	1			Rp 40 jt	
31	Manufaktur	1	Rp 650 jt			

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* ini masih menarik diteliti karena beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan adanya fenomena terjadinya kasus kecurangan yang ada di Indonesia sepanjang tahun 2018 sejumlah 96 kasus korupsi di anggaran desa. Penelitian Ahriati *et al*., (2015); Azmi (2017) membuktikan bahwa pengendaian internal, asimetri informasi dan ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap *fraud*, sedangkan penelitian Delfi (2014); Muna dan Harris (2018); Dewi *et al*., (2017) membuktikan bahwa pengendalian internal, asimetri informasi dan ketaatan aturan berpengaruh terhadap *fraud.*

2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis

Kecurangan *(Fraud)* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang ataupun kelompok melalui manipulasi laporan keuangan agar memperoleh keuntungan pribadi dan merugikan perusahaan atau instansi (Antarwiyati dan Purnomo, 2017). Kecurangan merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh seseorang yang bertujuan untuk

memperoleh manfaat untuk kepentingan diri sendiri (Suprajadi, 2009). Salah satu faktor yang memicu adanya fraud adalah lemahnya pengendalian internal organisiasi. Apabila pengendalian internal organisasi baik maka keyakinan dan keandalan atas laporan keuangan dapat dijamin (Delfi, 2014). Komponen pengendalian Internal COSO meliputi Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan (Arens, 2014). Beberapa komponen tersebut harus saling terintegrasi karena merupakan komponen yang sangat penting bagi organisasi. Penelitian Lestari dan Supadmi (2017); Muna dan Harris (2018) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan, semakin efektif organisasi menerapkan pengendalian internal maka kecurangan yang terjadi akan semakin kecil. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H_1: Pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud.

Asimetri informasi adalah kondisi dimana ada ketidaksesuaian informasi antara pihak yang memberi informasi dengan pihak yang membutuhkan informasi. Asimetri informasi terjadi ketika pihak yang memberikan informasi memiliki informasi yang lebih mengenai informasi internal yang ada di organisasi dan prospek masa depan organisasi (Lestari dan Supadmi, 2017). Terdapat dua tipe asimetri informasi yaitu *adverse selection dan moral hazard* (Swara *et al*., 2017). Kedua tipe asimetri tersebut memiliki permasalahan yang sama yaitu informasi yang tidak transparan atau tersembunyi. Oleh karena itu adanya informasi yang tersembunyi akan mengakibatkan permasalahan yang serius pada organisasi. Hasil penelitian Lestari dan Supadmi (2017) menjelaskan adanya asimetri informasi akan memicu tindakan *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Adanya asimetri informasi yang tinggi dalam sebuah organisasi maka *fraud* yang akan terjadi juga semakin besar. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H_2: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap fraud.

Ketaatan merupakan sebuah sikap patuh terhadap aturan yang berlaku. Aturan merupakan tindakan yang harus dipatuhi. Perusahaan pasti memiliki aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota salah satunya yaitu aturan dalam akuntansi. Aturan akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) (Rizky dan Fitri, 2017). Penelitian Dewi *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa ketaatan terhadap aturan akuntansi dapat memperkecil peluang pegawai untuk melakukan kecurangan. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap peraturan juga memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin taat pegawai terhadap aturan akuntansi maka *fraud* yang terjadi juga semakin rendah. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H_3: Ketaatan aturan akuntansi berpengaruh negatif terhadap fraud.

Perilaku tidak etis merupakan perilaku menyimpang dari tugas dan kewajiban yang disepakati. Perilaku tidak etis disebabkan karena lemahnya kontrol managemen atau pimpinan satu tingkat diatas sehingga membuka potensi karyawan melakukan tindakan yang tidak etis dan menimbulkan kerugian perusahaan (Dewi *et al.*, 2017). Penelitian Dewi *et al.*,

(2017) menjelaskan bahwa apabila perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pegawai semakin tinggi maka kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* juga semakin besar. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

H_4: Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap fraud.

3. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada responden penelitian. Responden penelitian ini adalah pegawai di Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul. Tehnik pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dengan mengacu pada kriteria yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Oleh karena itu untuk mempermudah pengambilan sampel dan memperoleh data yang berkualitas dilakukan penyebaran kuesioner menngunakan kriteria yaitu 1) Pegawai Pemerintah Desa bagian Kepala Urusan Keuangan; 2) telah bekerja > 1 tahun; 3) berusia > 20 tahun; 4) pendidikan minimal SMK/SMK.

Pengukuran Variabel

Variabel *fraud* diukur dengan kuesioner yang menggunakan 9 pertanyaan dengan indikator yaitu kecurangan laporan keuangan, korupsi dan penyalahgunaan aset (Rizky dan Fitri, 2017). Variabel pengendalian internal diukur dengan kuesioner yang menggunakan 5 pertanyaan dengan indikator yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan dan monitoring (Rizky dan Fitri, 2017). Seluruh pertanyaan diukur dengan skala 5 point yaitu 1 sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju.

Variabel asimetri informasi diukur dengan kuesioner yang menggunakan 6 pertanyaan dengan indikator yaitu manajemen memiliki informasi yang lebih baik, manajemen lebih mengetahui potensi kerja, manajemen lebih mengetahui teknik pekerjaan, manajemen lebih mengetahui faktor eksternal dan manajemen lebih mengetahui target (Najahningrum, 2013). Variabel ketaatan aturan akuntansi diukur dengan kuesioner yang menggunakan 7 pertanyaan dengan indikator yaitu tanggungjawab, integritas, obyektivitas, kehati hatian, kerahasiaan, konsistensi dan standar teknis (Rizky dan Fitri, 2017). Variabel perilaku tidak etis diukur dengan 5 pertanyaan dengan indikator yaitu perilaku mengabaikan aturan, penyalahgunaan kedudukan, sumberdaya organisasi, dan kedudukan (Rizky dan Fitri, 2017).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 kepala urusan keuangan di 75 pemerintah desa Kabupaten Bantul. Penyebaran kuesioner dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dengan hasil 61 kuesioner kembali. Dari kuesioner yang kembali hanya 59 kuesioner yang dapat dianalisis sisanya 2 kuesioner tidak dapat dianalisis karena tidak lengkap. Hasil analisis terhadap diskripsi responden ditunjukkan pada tabel 2. **S**etelah dilakukan analsis terhadap deskripsi responden selanjutnya dilakukan pengujian data yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas menggunakan pearson correlation dengan *p value* < 0,05. Uji reliabilitas dengan menggunakan nilai cronbach alpha dengan

batas cut-off 0,5. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh pertanyaan adalah valid. Contoh hasil uji validitas variabel *fraud* ditunjukkan pada tabel 3 .

Tabel 2. Deskripsi responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Usia:		
a. Kurang dari 20 tahun		
b. 21-30 tahun	9	14,8%
c. 31-40 tahun	16	26,2%
d. Lebih dari 40 tahun	36	59,0%
Jenis kelamin		
a. Pria	45	73,8%
b. Wanita	16	25,2%
Lama bekerja:		
a. Kurang dari 1 tahun	3	4,9%
b. 2-5 tahun	18	29,5%
c. 6-10 tahun	12	19,7%
d. Lebih dari 10 tahun	28	45,9%
Pendidikan terakhir:		
a. SMP	1	1,6%
b. SMK	29	47,5%
c. Diploma	8	13,1%
d. Sarjana	28	45,9%

Tabel 3. Hasil uji validitas variabel *fraud*

Item pertanyaan	Korelasi	*P value*	Keterangan
Y1	0,783	0,000	Valid
Y2	0,844	0,000	Valid
Y3	0,894	0,000	Valid
Y4	0,900	0,000	Valid
Y5	0,817	0,000	Valid
Y6	0,894	0,000	Valid
Y7	0,753	0,000	Valid
Y8	0,848	0,000	Valid
Y9	0,633	0,000	Valid

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	*Cronbach alpha*	Keterangan
Pengendalian internal	0,793	Reliabel
Asimetri informasi	0,923	Reliabel
Ketaatan aturan	0,660	Reliabel
Perilaku tidak etis	0,880	Reliabel
Fraud	0,938	Reliabel

Setelah dilakukan pengujian data langkah selanjutnya adalah dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan. Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien beta	P value	Keterangan
Pengendalian internal	-0,244	0,009*	H_1: terbukti
Asimetri informasi	-0,067	0,469	H_2: tidak terbukti
Ketaatan aturan	0,138	0,141	H_3: tidak terbukti
Perilaku tidak etis	0,669	0,000**	H_4: terbukti
F Hitung =18,143 Adj R^2 = 0,542		0,000**	

*Sig < 5%, ** sig < 1%

Hasil koefisien beta pada variabel pengendalian internal menunjukkan angka -0,244 dan nilai sig 0,009 yang berarti pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* (H_1 terbukti). Hasil koefisien beta pada variabel asimetri informasi menunjukkan angka -0,729 dan nilai signifikansi 0,469 yang berarti asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud* (H_2 tidak terbukti)**.** Hasil koefisien beta pada variabel ketaatan aturan akuntansi menunjukkan angka 1,495 dan nilai signifikansi 0,141 yang berarti ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud* (H3 tidak terbukti). Hasil koefisien beta pada variabel perilaku tidak etis menunjukkan angka 7,319 dan nilai signifikansi 0,000 yang berarti pengendalian internal berpengaruh positif terhadap *fraud* (H4 terbukti).

Variabel pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud* sejalan dengan penelitian Muna dan Harris (2017) yang membuktikan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap *fraud.* Sistem pengendalian internal pemerintah menjelaskan bahwa pengendalian merupakan kegiatan yang dilakukan secara *continue* yang dijalankan semua pegawai dalam suatu organisasi untuk memberikan keyakinan atas laporan keuangan. semakin tinggi pengendalian internal yang diterapkan semakin rendah *fraud* akan terjadi.

Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud.* Penelitian ini sejalan dengan Swara *et al.*, (2017) yang membuktikan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap *fraud.* Asimetri informasi tidak terjadi karena seluruh pegawai cenderung mengetahui seluruh informasi yang ada dalam suatu organisasi sehingga tidak ada kesenjangan informasi diantara semua pihak (Ahriati *et al.*, 2015).

Ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap *fraud.* Hasil ini sejalan dengan penelitian Azmi (2017) yang membuktikan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud.* Ketaatan aturan akuntansi adalah suatu proses yang harus ditaati dan dijalankan oleh seluruh pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk tercapainya suatu tujuan yaitu memberikan keandalan terhadap laporan keuangan. Kondisi keuangan suatu instansi dinilai dari sebuah laporan keuangan, suatu instansi jika tidak mematuhi aturan akuntansi dalam pengelolaan keuangan akan membuka peluang untuk melakukan tindakan kecurangan.

Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.*, (2017) yang membuktikan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecurangan. Perilaku tidak etis merupakan perilaku yang melanggar norma-norma sosial yang diterima secara umum salah satunya yaitu tindakan kecurangan yang dapat membahayakan keberlangsungan suatu organisasi. Semakin tinggi

perilaku tidak etis yang dimiliki oleh instansi maka semakin tinggi pula kesempatan untuk melakukan *fraud* (Rizky dan Fitri, 2017).

5. Kesimpulan dan Implikasi

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pengendalian internal dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud*, sedangkan asimetri informasi dan ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul dalam upaya pencegahan *fraud* dengan melakukan peningkatan ketaatan aturan akuntansi dan memperkuat penerapan pengendalian Internal.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah pertama penelitian hanya dilakukan di Pemerintah Desa se-Kabupaten Bantul dengan mengambil sampel Kepala Urusan Keuangan dengan sejumlah 75 reponden saja. Penelitian selanjutnya dapat memperbanyak sampel dengan menambahkan staff keuangan untuk menambah jumlah responden penelitian karena semakin banyak sampel yang digunakan dalam pengujian maka akan memberikan hasil yang mendekati sebenarnya (Dewi *et al.*, 2017). Kedua, penelitian ini hanya meneliti variabel seperti pengendalian internal, asimetri informasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis yang dimana hanya sebesar 54, 2% berpengaruh terhadap *fraud*. Penelitian selanjutnya diharapkan mempertimbangkan untuk menambah variabel penelitian seperti moralitas manajemen dan kepuasan kerja (Shintadevi, 2015). Ketiga, penelitian ini hanya membagikan kuesioner kepada responden. Diharapkan penelitian selanjutnya mendampingi responden dalam mengisi kuesioner agar tidak terjadi perbedaan persepsi dengan cara memberikan penjelasan secara langsung dan ditambah dengan metode wawancara (Atmadja, *et al.*, 2017).

Daftar pustaka

Ahriati, D., Basuki, P., & Widiastuty, E. (2015). Analisis pengaruh sistem pengendalian internal, asimetri informasi, perilaku tidak etis dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal InFestasi*, *811*(1), 41–55.

Antarwiyati, P., & Purnomo, R. E. (2017). Motivasi melakukan fraud dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, *12*(2), 157–166. https://doi.org/10.20885/jaai.vol21.iss2.art7

Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). Auditing & Jasa Assurance. *Erlangga. Edisi Kelimabelas*.

Atmadja, A. T., Adi, K., & Saputra, K. (2017). Pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, *12*(1), 7–16.

Azmi, N. (2017). Pengaruh ketaatan aturan akuntansi, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi pada BUMN di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, *5*(2).

Delfi, T. (2014). Pengaruh efektifitas pengendalian internal dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Survey pada perusahaan BUMN cabang Pekanbaru). *JOM Fekon*, *1*(2), 1–17. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.043

Dewi, C. K. R., Surya, R. A. S., & Hasan, M. A. (2017). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. *JOM Fekon*, *4*(1), 1443–1457.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Lestari, N. K. L., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh pengendalian internal, integritas dan asimetri informasi pada kecurangan akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, *21*(1), 389–417.

Muna, B. N., & Harris, L. (2018). Pengaruh pengendalian internal dan asimetri akuntansi (Penelitian persepsi pengelola keuangan pada Perguruan Tinggi Negeri BLU). *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, *6*(1), 35–44.

Najahningrum, A. F. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud: Persepsi Pegawai Dinas Provinsi DIY. *Accounting Analysis Journal*, *2*(3), 259–267.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (n.d.).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).

Rizky, M., & Fitri, F. A. (2017). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, penegakan hukum, dan perilaku tidak etis terhadap kecurangan akuntansi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMEKA)*, *2*(2), 10–20.

Shintadevi, P. F. (2015). Pengaruh keefektifan pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan perilaku tidak etis sebagai variabel intervening. *Nominal*, *Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, *4*(2), 111–126. https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.8003

Sugiyono. (2016). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suprajadi, L. (2009). Teori kecurangan, fraud awareness dan metodologi untuk mendeteksi kecurangan pelaporan keuangan. *Bina Ekonomi*, *13*(2), 52–58.

Swara, S. P., Saragih, K., & Sinaga, S. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi pada PT. Bank DKI. *Fundamentaln Management Journal*, *2*(1), 14–25